

Jalur non-elit menuju kepemimpinan politik perempuan

Temuan awal dari Medan, Indonesia

Perempuan aktif dalam kegiatan politik dan sosial akar rumput, namun mereka tetap kurang terwakili di badan legislatif. Perempuan yang memenuhi kuota secara tidak proporsional berasal dari latar belakang 'elit', yang menyebabkan kurangnya keragaman pengalaman dan minat perempuan dalam badan pembuat keputusan. Proyek ini berusaha untuk memahami mengapa perempuan 'akar rumput' tidak terpilih, dengan menarik wawasan komparatif dari Indonesia dan Sri Lanka.

Penelitian yang ada tentang perwakilan perempuan terpilih mengungkapkan jalur berbeda perempuan memasuki politik elektoral. Kami mengambil pendekatan berbeda dengan juga berbicara dengan perempuan yang aktif di akar rumput untuk memahami mengapa mereka tidak mengambil jalan yang sama. Wawancara mendalam dengan dua tipe perempuan – mereka yang pernah dan belum memasuki politik – dengan mengungkap faktor-faktor utama yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam politik formal.

Catatan penelitian singkat ini menguraikan temuan awal dari wawancara studi kasus yang dilakukan di Medan, Indonesia (Oktober hingga Desember 2020). Kami mewawancarai 16 perempuan (1-2 kali), terdiri dari: 7 saat ini (termasuk petahana) atau mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat Kota dan Provinsi, dan; 9 pemimpin dari berbagai organisasi, termasuk kelompok agama, organisasi komunitas / etnis, dan LSM feminis yang tidak ikut serta dalam pemilu. Medan adalah kota yang beragam etnis, responden berasal dari etnis Tionghoa, Batak, Karo, Minang, Tamil dan Melayu. Tujuh responden adalah Muslim (agama mayoritas di Medan), sisanya campuran Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Cu dan agama lokal Parmalim.

Analisis awal kami mengungkapkan terdapat sembilan temuan utama:

Membangun 'infrastruktur' yang tepat untuk memasuki politik membutuhkan pandangan jauh ke depan dan perencanaan. Perempuan dari akar rumput mengatakan bahwa mereka kekurangan infrastruktur untuk politik: yaitu, jaringan / aliansi politik, kapasitas, sumber daya (kebanyakan keuangan) dan hubungan dengan masyarakat. Aktivitas sosial yang ekstensif tidak dengan mudah diterjemahkan ke dalam peluang politik, karena: aktivitas seperti itu kurang 'visibilitas'; komunitas yang dilayani oleh organisasi tidak memetakan ke batas-batas politik pemilihan; kemampuan tidak sesuai atau kurang diakui di bidang politik; prioritas seperti pemberdayaan perempuan tidak diterjemahkan ke dalam modal politik. Membangun infrastruktur yang tepat membutuhkan kejelian akan ambisi politik masa depan dan tahun perencanaan yang terarah, bahkan puluhan tahun sebelumnya.

Magang politik dimulai sejak dini dan memerlukan lebih dari sekadar keterampilan belajar. Politisi perempuan merujuk pada pengalaman awal yang didorong untuk berbicara, merasa bahwa mereka setara dengan laki-laki, untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Kebalikan dari kesempatan ini adalah sosialisasi kebanyakan wanita, menjadi lemah lembut, mengutamakan orang lain, dan mematuhi norma-norma patriarkal. Magang politik juga memerlukan pengembangan disposisi dan kepekaan untuk berbicara dengan orang-orang di 'akar rumput', dan untuk memahami hubungan kompleks masyarakat. Menanamkan perasaan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin politik (sebagai kemungkinan menjadi seseorang) maka dimulai sejak dini, dan sebagian menjelaskan mengapa perempuan dari keluarga politik cenderung lebih sukses dalam politik.

Uang dibutuhkan untuk memenangkan pemilu, tetapi politik uang hanyalah salah satu strategi. Uang sangat diperlukan untuk biaya kampanye, tetapi memberikan uang tunai secara langsung kepada pemilih bukanlah strategi yang penting, dan juga bukan strategi yang berhasil. Wanita yang terpilih

menjadi dewan menekankan pentingnya berhubungan dengan komunitas, 'turun' ke akar rumput, berbagi cerita dan mendengarkan cerita mereka. Hadiah dan suvenir di beberapa tempat diharapkan sebagai bagian dari pembangunan hubungan ini, tetapi hubungan yang asli mengurangi biaya keseluruhan. Konstituensi dapat dibangun yang cukup besar untuk dipilih tanpa pembelian suara, karena mengetahui bahwa sebagian besar pemilih pasti akan memberikan suara sesuai dengan cara mereka dibayar. Mendidik pemilih dan mengurangi sinisme politik mereka adalah strategi untuk mengurangi pentingnya uang tunai. Biaya pemilu adalah alasan paling konsisten yang diberikan untuk tidak memasuki politik formal; perempuan yang tidak pernah ikut serta dalam pemilihan cenderung lebih menekankan pada pembelian suara langsung daripada mereka yang pernah ikut serta. Meskipun mungkin ada beberapa alasan untuk ini, 'politik uang' secara budaya kompleks, dan bukan penjelasan sederhana untuk keterwakilan politik perempuan.

Kompatibilitas yang dirasakan antara lingkungan politik dan sosial merupakan faktor penentu.

Hubungan antara politik dan agama sering kali menentukan apakah perempuan merasa mampu mengejar karir politik. Bagi beberapa orang, tidak ada pemisahan, dan agama adalah sarana untuk memasuki rumah orang dan untuk menunjukkan 'kepemimpinan' dalam arti holistik. Bagi yang lain, agama mereka secara eksplisit apolitik: strategi bertahan hidup khususnya untuk etnis Tionghoa. Beberapa gereja menawarkan kesempatan kepemimpinan bagi wanita, sementara di gereja lain, kepemimpinan wanita tidak disarankan. Perbedaan kesesuaian antara agama dan politik memetakan ke dalam perbedaan etnis, dan karenanya mempengaruhi representasi perempuan minoritas.

Selain agama, beberapa responden 'merasa' negatif tentang politik, yang dianggap bertentangan dengan aktivitas sosial. Yang lain melihat politik sebagai perpanjangan alami. Bagi sebagian aktivis, politik kepartaian 'memecah belah', khususnya seputar etnis, agama, ras (SARA) dan perpecahan sosial, dan merupakan permainan kotor yang harus dihindari. Beberapa bertujuan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan dan agenda legislatif dari masyarakat sipil, tetapi terkadang dibuat frustrasi oleh kurangnya respon dari para pemimpin politik. Cara perempuan memahami 'bidang politik' dalam hubungannya dengan bidang lain memengaruhi kesediaan mereka untuk terlibat dalam proses politik.

Politik mahasiswa adalah jalan menuju politik formal, tetapi hanya sedikit perempuan yang melangkah.

Perwakilan perempuan terpilih menerima paparan politik awal dan pelatihan melalui politik mahasiswa, terutama dalam gerakan demokrasi (reformasi) di akhir 1990-an. Politik mahasiswa tetap menjadi bagian penting dari kampus universitas saat ini, sering kali terkait dengan kelompok agama seperti organisasi Dakwah Islam. Ada banyak peluang bagi aktivis perempuan muda untuk terlibat dalam politik mahasiswa, namun hanya sebagian kecil yang mengikuti jalur ini menuju politik formal. Memiliki mentor 'senior' adalah salah satu faktor yang memfasilitasi transisi ini, tetapi mentor seperti itu cenderung lebih tersedia untuk pria. Lebih lanjut, perempuan tampaknya memikul lebih banyak tanggung jawab untuk menjaga 'kemurnian moral' dari politik mahasiswa. Memahami jalur yang berbeda (dan hambatan) dari pelajar ke politik formal untuk pria / wanita merupakan prioritas penelitian yang penting.

Pentingnya dorongan yang menentukan perempuan dari akar rumput untuk melangkah maju.

Media cenderung berfokus pada perempuan dari latar belakang elit dan dinasti, terutama pada tingkat representasi yang lebih tinggi. Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perempuan berasal dari berbagai latar belakang, dengan kegiatan *pipeline* (alur kerja ke dalam masyarakat) antara lain: perawat, bidan, kepala desa, pekerja credit union, pemuka agama, dan sebagainya. Seringkali perbedaan antara mereka yang memulai karir politik dan mereka yang tidak, adalah dorongan sederhana. Wanita merujuk pada ucapan motivasi, atau saat seseorang mengidentifikasi potensi politik mereka, sebagai momen penting yang menginspirasi mereka untuk bergabung dengan politik. Bagi yang lain, keterlibatan dalam masalah sosial memberikan dorongan. Kebalikannya adalah bahwa banyak pemimpin perempuan di akar rumput yang belum menerima dorongan seperti itu, dan oleh karena itu kemungkinannya kecil

untuk menampilkan diri mereka sendiri. Yang lain telah menerima dorongan dari partai politik, tetapi menganggap cita-cita tidak sesuai dengan mereka, dan karenanya tidak menerima undangan tersebut.

Peran budaya perempuan dalam komunitas lebih merupakan bantuan daripada penghalang aktivitas politik. Responden mencatat peran perempuan dalam komunitas membantu mereka memenangkan pemilihan. Kebiasaan perempuan mengunjungi keluarga, terutama di daerah pedesaan, memungkinkan mereka mengembangkan hubungan yang kuat dengan banyak rumah tangga. Daripada melihat gender mereka sebagai penghalang elektabilitas, responden menemukan gender mereka berguna secara politik: sesuatu yang digunakan partai politik, tetapi tidak selalu dengan cara yang menguntungkan kandidat perempuan. Pada saat yang sama, tidak semua orang menerima pemimpin politik perempuan, dan masih ada gagasan gender seputar kepemimpinan yang merugikan perempuan. Selain itu, laki-laki juga dapat berhubungan dengan anggota masyarakat melalui berbagai forum, misalnya mengadakan pertemuan di kedai kopi. Diperlukan lebih banyak penelitian tentang bagaimana pria dan wanita secara berbeda mengembangkan hubungan komunitas, dan bagaimana hal ini membentuk peluang politik mereka.

Negosiasi dengan anggota keluarga menentukan peluang politik perempuan. Rumah tangga adalah tempat strategis untuk keterlibatan politik perempuan, penting untuk sosialisasi awal, motivasi, dan sumber daya keuangan. Kekritisan rumah tangga merupakan salah satu faktor utama mengapa mayoritas perwakilan perempuan berasal dari keluarga politik. Pada saat yang sama, peran dan identitas gender bisa menjadi penghalang. Peran wanita yang dihormati sebagai ibu dapat membatasi mereka pada rumah tangga. Kewajiban mengasuh tidak serta merta selesai saat anak sudah dewasa sudah mandiri, karena ada harapan untuk mengasuh cucu. Bagi perempuan yang ingin terjun ke dunia politik, negosiasi dengan keluarga sangat penting, dan kemauan ayah, suami, dan anak berdampak besar pada kemungkinan politik.

Kuota memiliki dampak positif dan negatif terhadap aktivitas politik perempuan. Keharusan partai untuk memasukkan perempuan satu dalam 3 daftar calon dalam surat suara mengharuskan partai untuk menjangkau perempuan yang aktif di akar rumput. Dengan demikian, kuota telah menciptakan peluang bagi perempuan untuk mengikuti pemilu. Pada saat yang sama, partai-partai seringkali menggunakan perempuan, menempatkan mereka pada posisi yang tidak dapat dimenangkan dalam daftar, sambil mendapatkan keuntungan dari kampanye mereka yang meningkatkan suara partai secara keseluruhan. Wanita menjelajahi medan ini, menggunakan instrumen yang tersedia bagi mereka untuk mewujudkan tujuan politik dan sosial mereka.

Apa berikutnya?

Wawancara studi kasus ini bersifat eksploratif, mengungkap jalur berbeda menuju politik, dan berbagai faktor yang mendorong / menghalangi aktivis perempuan untuk mencari karier politik. Namun, wawancara studi kasus tidak memungkinkan kita untuk memahami beragam cara perempuan memahami dan mengalami masalah ini, terutama dalam konteks penting seperti Medan di mana agama, etnis, kelas, dan sebagainya, membentuk kemungkinan politik.

Tahap penelitian berikutnya adalah Diskusi Kelompok Fokus untuk menambah kedalaman pemahaman kita (direncanakan bulan April 2021). Penelitian pendahuluan kami telah mengidentifikasi tema-tema yang perlu diinterogasi lebih lanjut, dan membantu kami menentukan kelompok perempuan mana yang akan menjadi peserta FGD di Medan. Peserta FGD antara lain: mahasiswa, kader partai, bidan, pemuka agama, dan pekerja LSM. Berdasarkan temuan dari wawancara dan FGD di Indonesia dan Sri Lanka, kami akan mengembangkan serangkaian pertanyaan survei untuk menentukan seberapa luas dan konsisten faktor-faktor yang memfasilitasi / mencegah perempuan akar rumput memasuki politik formal, dan bagaimana perbedaan mereka di seluruh identitas yang saling bersilangan. Dialog

penelitian reflektif (Reflexive Research Dialogues) akan memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk memahami temuan penelitian, dan merefleksikan dan kepentingan kebijakan dan implementasi.

Pendekatan eksploratif dari wawancara kualitatif telah menghasilkan data yang menambah nuansa wawasan, atau mengoreksi, pemahaman yang ada di dalam literatur. Berdasarkan kekayaan wawasan yang diperoleh melalui wawancara studi kasus, kami akan menulis tentang tiga topik dalam artikel jurnal ilmiah: a) politik uang, b) infrastruktur dan magang, dan; c) politik mahasiswa.

Temukan lebih banyak lagi

Proyek penelitian ini merupakan kerjasama antara Universitas Sumatera Utara (USU), Australian National University (ANU), University Technology Sydney (UTS), dan International Center for Ethnic Studies, Colombo (ICES). Ini adalah salah satu dari beberapa proyek yang didanai di bawah Development Leadership Program (DLP), sebuah kolaborasi penelitian internasional yang didukung oleh Departemen Luar Negeri (DFAT) Pemerintah Australia. DLP menyelidiki peran penting yang dimainkan para pemimpin, jaringan, dan koalisi dalam mencapai hasil pembangunan. (<https://www.dlprog.org/projects/non-elite-pathways-to-women-s-political-leadership-in-sri-lanka-and-indonesia>).

Catatan penelitian ini ditulis oleh tim peneliti Indonesia: Asima Yanty Siahaan (USU), Tanya Jakimow (ANU), Yumasdaleni dan Aida Harahap. Silakan email Asima Siahaan asimayantysiahaan@gmail.com atau Tanya Jakimow tanya.jakimow@anu.edu.au untuk informasi lebih lanjut.

